

Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia

Dito Aditia Darma Nasution¹
Puja Rizqy Ramadhan²

^{1,2} Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab),
Sumatera Utara, Indonesia
e-mail: ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Teori yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah teori agensi. Penelitian ini dilakukan pada 32 pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan model regresi sederhana, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Temuan tersebut menguatkan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian ini memberikan implikasi berupa kontribusi yang bermanfaat bagi pejabat pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dalam menunjukkan peran penting implementasi *e-budgeting* untuk mendorong transparansi keuangan daerah. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik implementasi *e-budgeting* dan transparansi keuangan daerah.

Kata kunci: *E-Budgeting*, transparansi, keuangan daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementing e-budgeting on regional financial transparency in Indonesia. The theory used to achieve the objectives of this study is agency theory. This research was conducted at 32 local governments in Indonesia. Based on a simple regression model, this study shows that the implementation of e-budgeting has a positive and significant effect on regional financial transparency in Indonesia. These findings reinforce previous research. The findings of this study have implications in the form of useful contributions to government officials (executive and legislative), in demonstrating the important role of e-budgeting to encourage regional financial transparency. In addition, the findings of this study can be used as a basis for further research related to the topic of implementing e-budgeting and regional financial transparency.

Keywords: *E-Budgeting*, transparency, regional finance.

PENDAHULUAN

Terbitnya peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditandatangani oleh Presiden mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah menerapkan SAP berbasis akrual per 1

Januari 2015 (Nasution, 2016). Penerapan SAP berbasis akrual menuntut seluruh kegiatan pengelolaan keuangan harus akuntabel dan transparan sehingga untuk mendukung hal tersebut pemerintah pusat dan daerah harus membuat pola kerja penganggaran ke era sistem informasi digital yaitu berbasis elektronik (Nst, 2019). Era penganggaran berbasis elektronik atau yang sering disebut dengan e-budgeting menuntut seluruh aktivitas pengelolaan keuangan daerah dalam perencanaan dan penganggaran harus menggunakan sistem yang modern, hal ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan dari aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut. Fenomena tersebut juga berlaku pada organisasi-organisasi bisnis maupun instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah walaupun pada organisasi bisnis penerapan e-budgeting telah lebih dahulu dikenal daripada di instansi pemerintah. Anggaran organisasi pemerintahan berbeda dengan anggaran perusahaan dalam 2 (dua) hal, yaitu pertama, penganggaran pada pemerintah dilakukan untuk menganggarkan belanja/pengeluaran pemerintah sedangkan penganggaran pada perusahaan dilakukan untuk menganggarkan laba. Kedua yaitu terkait dengan Efek roda gigi searah (*ratchet*) yang merupakan bentuk bias perilaku penyusun anggaran dalam proses penentuan atau perencanaan anggaran. Efek *ratchet* pada anggaran perusahaan terkait dengan bonus berbasis pencapaian target laba yang memberi manfaat bagi perusahaan, sedangkan efek *ratchet* pada anggaran pemerintah terkait dengan kerugian masyarakat akibat pertumbuhan anggaran yang tidak efisien (Susanto & Halim, 2018).

Pada era informasi digital saat ini instansi pemerintah mulai serius dalam melakukan reformasi/perubahan sistem keuangan negara. Reformasi keuangan daerah di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya paket undang-undang (UU) Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) dan UU tentang Otonomi Daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004), serta Peraturan Pemerintah (PP) (PP No. 58 Tahun 2005) dan diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Salah satu sorotan utama reformasi keuangan daerah adalah terwujudnya pengelolaan keuangan publik yang transparan dengan berlandaskan pada konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009).

Reformasi di bidang keuangan daerah di Indonesia menuntut peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagai salah satu indikator ketercapaian *good governance*. salah satu kriterianya adalah ketepatan dan keakuratan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui implementasi *e-budgeting*. implementasi *e-budgeting* mampu menghasilkan serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang relevan, handal, dan dapat dipercaya (Fajri *et al*, 2019).

Tata laksana pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance* adalah suatu konsep tata kelola organisasi yang diterapkan secara baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi (Sriwijayanti, 2018). Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah

mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Adiwirya & Sudana, 2015).

Dalam rangka membantu penerapan prinsip *good governance* dan memfasilitasi pemerintah mempersiapkan aparatnya menghadapi reformasi tata kelola keuangan daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah merancang program aplikasi penganggaran berbasis digital berupa *e-budgeting* yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sehingga prinsip tata kelola keuangan yang baik dapat diterapkan dan berdampak kepada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan (Nasution, 2019). Maka dari itu, semakin berjalan dengan efektif implementasi *e-budgeting* maka diharapkan akan memperoleh manfaat, antara lain proses transaksi dan penyiapan laporan lebih cepat, memiliki keakuratan dalam perhitungan, dapat menyimpan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan lebih rendah, informasi keuangan lebih relevan, transparan, cepat, akurat, lengkap dan dapat di uji kebenarannya.

Implementasi *e-budgeting* tidak akan dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, tentu sangat krusial apabila penganggaran berbasis digital yang sudah baik sistemnya dirusak dengan kompetensi sumber daya manusia yang buruk karena kurang memahami konsep

dasar dan peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Salah satu filosofi yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung agar berjalan dengan efektifnya konsep *e-budgeting* yaitu bahwa pegawai dipandang sebagai sebuah investasi bagi institusi, di mana jika karyawan atau pegawai tersebut dikelola dengan perencanaan yang baik dan lebih profesional, maka akan memberikan imbalan bagi institusi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar, dan kemungkinan pencapaian tujuan institusi lebih efektif dan efisien (Nasution, 2019). Menurut Trisnawati & Wiratmaja (2018) Peningkatan kualitas kinerja sumber daya pegawai sangat diperlukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja. Pengembangan kualitas kerja sumber daya pegawai adalah untuk meningkatkan kinerja operasional pegawai dalam melaksanakan tugas - tugas pemerintah. Sumber daya pegawai adalah asset utama dalam organisasi yang menjadi pelaku dan perencana aktif dari setiap aktifitas dalam organisasi. Aparatur pemerintah dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diharapkan memiliki sikap yang profesional, kompeten dan akuntabel yang dapat mendukung kondisi pemerintahan yang transparan, demokratis berkeadilan, efektif dan efisien dengan menghormati hukum yang mendorong terciptanya partisipasi dan pemberdayaan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikenal dengan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan

APBD yang baik menerapkan prinsip *Value for Money*. *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi (Cui, 2004). Agar prinsip *Value for Money* dapat diterapkan maka harus ditunjang juga dengan pelaksanaan transparansi, akuntabilitas serta dukungan pemanfaatan *e-budgeting* dalam pengelolaan APBD, sehingga pemanfaatan APBD yang hemat, adil, merata, transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat tercapai.

Salah satu bentuk transparansi diperkuat dengan terbitnya aturan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Yildiz *et al*, 2017). Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik karena akuntabilitas dan transparansi merupakan konsep awal dari pemikiran diterapkannya SAP berbasis akrual (Nasution, 2018). Maka dapat disimpulkan transparansi merupakan pondasi yang harus senantiasa tegak dalam pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah dipertegas dengan diterbitkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, berkewajiban menerbitkan informasi publik atas setiap aktivitas yang dilaksanakannya. UU ini, kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi

Mendagri tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan *menu content* dengan nama TPAD dalam *website* resmi pemerintah daerah.

Namun demikian, beberapa temuan penelitian yang menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang diterbitkan tersebut ternyata tidak serta merta diiringi dengan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari temuan penelitian terdahulu yaitu oleh Hermana *et al.* (2012), Shopia & Husen (2013), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (2013), (Martani, Fitriasari, & Annisa, 2014), dan Nasution (2018) yang menginformasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah. Selanjutnya, fenomena rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah juga tercermin dari masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa sebanyak 483 kasus korupsi melibatkan kepala daerah selama periode tahun 2010 hingga Mei 2019, sementara *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melaporkan bahwa sebanyak 203 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019.

Selanjutnya, penelitian terdahulu oleh Nasution & Atika (2019) telah menunjukkan bahwa kebijakan transparansi bergantung pada dan dipengaruhi oleh kualitas implementasi *e-budgeting*. Namun, penelitian tersebut masih terbatas dilakukan pada satu pemerintah daerah yaitu Kota Binjai. Untuk memperluas area riset di Indonesia dan sebagai *novelty* penelitian, maka peneliti mengembangkan penelitian dari Nasution & Atika (2019) ke dalam lingkup yang lebih luas yaitu dengan meneliti pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi

pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kota Binjai merupakan bagian terkecil dan merupakan cerminan dari *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan pemangku kepentingan. Akan tetapi, *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kota Binjai masih perlu dilakukan pengembangan lingkup penelitian yang lebih luas karena tidak semua pemerintah daerah di Indonesia memiliki struktur dan strategi yang sama dengan pemerintah daerah Kota Binjai. Dengan demikian apakah hasil yang sama, yang ditemukan dalam lingkungan pemerintah daerah Kota Binjai juga ditemukan dalam lingkungan pemerintahan daerah di Indonesia, hal ini masih menyisakan pertanyaan.

Penganggaran secara elektronik (*E-Budgeting*) adalah suatu sistem penganggaran yang berbasis web/aplikasi program untuk memfasilitasi proses penganggaran daerah (Rahman *et al*, 2018). *e-budgeting* pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pejabat pemerintahan (eksekutif dan legislatif). Dalam hal pengambilan keputusan yang efektif terkait dengan upaya-upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi publik dengan menginvestigasi pengaruh *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sebagai upaya dalam memperkuat azas keterbukaan. Azas keterbukaan

(transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara (Nasution, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis berikut (dinyatakan dalam bentuk alternatif) mengenai pengaruh *e-budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia.

H₁: Terdapat pengaruh *e-budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini berupa nilai kinerja *e-budgeting* dan data pengelolaan keuangan daerah. Data indeks *e-budgeting* pemerintah daerah diperoleh dari Indonesia Governance Index 2018. Data pengelolaan keuangan daerah diolah dari masing-masing *website* resmi pemerintah daerah. Sampel penelitian ini adalah terdiri dari 32 (tiga puluh dua) pemerintah daerah di Indonesia.

Teknik pengambilan sampel penelitian secara non probabilitas (pemilihan non-random) dengan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel dengan metode tersebut didasarkan pada jumlah data yang tersedia, khususnya nilai *e-budgeting* pemerintah daerah masih terbatas pada beberapa pemerintah daerah saja. Dengan demikian tidak dimungkinkan untuk dilakukan dengan sistem random (acak), karena tidak semua pemerintah daerah mendapatkan nilai *e-budgeting*.

Adapun kriteria-kriteria digunakan untuk menyaring sampel adalah (1) Pemerintah daerah yang memperoleh nilai indeks implementasi e-Budgeting yang dikeluarkan oleh Indonesia Governance Index Tahun 2018; (2) Pemerintah daerah yang tidak memiliki *website* resmi dan atau tidak dapat diakses dikeluarkan dari sampel. Tabel 1 berikut ini menunjukkan proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 1.
Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
1. Pemerintah daerah yang memperoleh nilai indeks implementasi <i>e-budgeting</i> yang dikeluarkan oleh Indonesia Governance Index Tahun 2018	33
2. Dikeluarkan karena tidak memiliki <i>website</i> resmi dan atau tidak dapat diakses	1
Sampel Akhir	32

Sumber: Data diolah, 2019

Penelitian ini menggunakan jeda waktu dalam menguji pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Nasution & Atika (2019) yang dilakukan pada pemerintah daerah Kota Binjai dalam konteks implementasi *e-budgeting*. Mereka memprediksi keinformatifan informasi yang disajikan pemerintah daerah Kota Binjai tahun t (sekarang) berdasarkan pada kualitas implementasi *e-budgeting* pemerintah daerah Kota Binjai tahun t-1 (sebelumnya). Mengingat, struktur dan kompleksitas organisasi pemerintah daerah di Indonesia, sehingga peneliti menganggap dampak dari implementasi *e-budgeting* memiliki jeda waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan implementasi *e-budgeting* pemerintah daerah Kota Binjai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jeda waktu 3 (tiga tahun).

Dalam penelitian ini implementasi *e-budgeting* pemerintah daerah didefinisikan sebagai proses memformulasi/perencanaan dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan terkait dengan anggaran melalui interaksi antara eksekutif, legislatif, dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis) secara elektronik. *Indeks Good Governance (IGI)* merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah, khususnya terhadap empat arena yaitu arena pemerintah (eksekutif dan legislatif), birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur. Dengan menggunakan skala pengukuran dari angka 1 (terendah) hingga 10 (tertinggi). Nilai yang dikeluarkan oleh *Indeks Good Governance (IGI)* 2018 dinyatakan dalam satuan desimal.

Sementara itu, transparansi pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai suatu bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh publik (masyarakat), mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Lulaj & Haxhi, 2019). Pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada tiga tahapan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; dan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Lebih lanjut, masing-masing tahapan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria utama transparansi informasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu: ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan (Puron-Cid & Gil-

Garcia, 2018). Ketersediaan menunjukkan bahwa informasi pengelolaan keuangan daerah yang diukur tersedia di *website* resmi pemerintah daerah. Aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi yang tersedia tersebut dapat diunduh oleh publik. Sementara itu, ketepatan waktu pengungkapan didefinisikan sebagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah disajikan (disediakan) di *website* resmi pemerintah daerah, sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan (diharapkan). Lebih lanjut, ketepatan waktu dinilai berdasarkan tanggal unggah pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi pengelolaan keuangan daerah dengan membandingkan tanggal yang dipersyaratkan (diharapkan) peneliti. Dalam penelitian ini waktu yang dipersyaratkan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen pengelolaan keuangan daerah ditetapkan. Pengambilan keputusannya adalah apabila pemerintah daerah mempublikasikan informasi pengelolaan keuangan daerah pada rentang waktu yang dipersyaratkan, maka dinyatakan tepat waktu. Sebaliknya, apabila informasi pengelolaan keuangan daerah dipublikasikan melewati rentang waktu yang dipersyaratkan, maka dinyatakan tidak tepat waktu (Zucolotto & Teixeira, 2014).

Instrumen transparansi pengelolaan keuangan daerah dimodifikasi dari instrumen penelitian Nasution (2018). Modifikasi instrumen Nasution (2018) dengan menambahkan indikator aksesibilitas, ketepatan waktu publikasi, dan perubahan tanggal dan tahun pengamatan pengelolaan keuangan daerah. Penilaian pada tahap perencanaan APBD terdiri dari 10 (sepuluh) indikator, tahap pelaksanaan APBD terdiri dari 9 (sembilan) indikator, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBD terdiri dari 10 (sepuluh) indikator. Untuk lebih

jelasnya mengenai ringkasan poin-poin instrumen pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Rincian Indikator Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahapan	Rincian Indikator	Tahun	
Perencanaan	Ringkasan Dokumen RKPD	2016	
	Kebijakan Umum Anggaran	2016	
	Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran	2016	
	Ringkasan Dokumen RKA-SKPD	2016	
	Ringkasan Dokumen RKA-PPKD	2016	
	Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	2016	
	Peraturan Daerah tentang APBD	2016	
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2016	
	Ringkasan DPA SKPD	2016	
	DPA PPKD	2016	
	Realisasi Pendapatan Daerah	2016	
	Realisasi Belanja Daerah	2016	
	Realisasi Pembiayaan Daerah	2016	
	Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	2016	
Pelaksanaan	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	2016	
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2016	
	Ringkasan RKA Perubahan APBD	2016	
	Rencana Umum Pengadaan	2016	
	SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2016	
	Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi	2016	
	Pelaporan dan Pertanggung jawaban	Laporan Arus Kas	2015
		Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD	2015
		Laporan Realisasi Anggaran PPKD	2015
		Neraca	2015
CaLK Pemerintah Daerah		2015	
Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah		2015	
Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah		2015	
Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2015	
Opini BPK RI		2015	

Sumber: Data diolah, 2019

Selanjutnya, pengambilan data dilakukan dengan menelusuri *website* resmi pemerintah daerah selama bulan November 2018 sampai dengan awal bulan Januari 2019.

Adapun cara penentuan indeks transparansi adalah; Pertama, pengukuran menggunakan skor dikotomi, Jika suatu item tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika tidak tersedia, tidak dapat diakses (diunduh), dan tidak tepat waktu akan diberi nilai 0. Kedua, skor yang diperoleh untuk kriteria ketersediaan dan aksesibilitas masing-masing dikalikan 0,25, dan ketepatan waktu dikalikan 0,5, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap indikator. Ketiga, skor yang diperoleh setiap indikator dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap pemerintah daerah. Keempat, menghitung tingkat transparansi dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh setiap indikator, kemudian dikalikan seratus (Woro & Supriyanto, 2016).

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Analisis regresi menggunakan *software* SPSS IBM 21. Model regresi dalam penelitian ini dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{LnTKD} = a + b \text{LnIeB} + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- LnTKD : Log Natural Transparansi Keuangan Daerah
- LnIeB : Log Natural Implementasi *e-Budgeting*
- a : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- e : Kesalahan Pengganggu (*Error term*)

Model di atas, diadaptasi dari Beekes & Brown, (2006), Arman *et al.* (2011), serta Beekes *et al.* (2016) dalam kontek perusahaan. Namun demikian, tidak semua variabel independen dari penelitian tersebut dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti ukuran (*size*), solvabilitas (*leverage*), berita baik (*good news*), dan volatilitas (*volatility*). Hal ini dikarenakan, kompleksitas organisasi pemerintahan dan perbedaan tujuan organisasi. Dengan kata lain, lingkungan pemerintahan berbeda signifikan dengan lingkungan perusahaan. Akibatnya, pengukuran variabel tersebut juga akan berbeda ketika diterapkan dalam lingkungan pemerintahan, sehingga memerlukan penelitian lain untuk membahas masalah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu variabel prediktor (implementasi *e-budgeting*) saja, sebagai penelitian pertama dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil statistik deskriptif diketahui bahwa variabel implementasi *e-budgeting* memiliki nilai minimum 4,45 dari indeks terendah sebesar 0,00, nilai maksimum 6,80 dari indeks tertinggi sebesar 10,00, dan nilai rata-rata sebesar 5,74. Variabel transparansi keuangan daerah memiliki nilai minimum 3,45 dari indeks terendah sebesar 0,00, nilai maksimum 50,00 dari indeks tertinggi sebesar 100,00, dan nilai rata-rata sebesar 17,24. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian disajikan pada tabel 3 berikut.

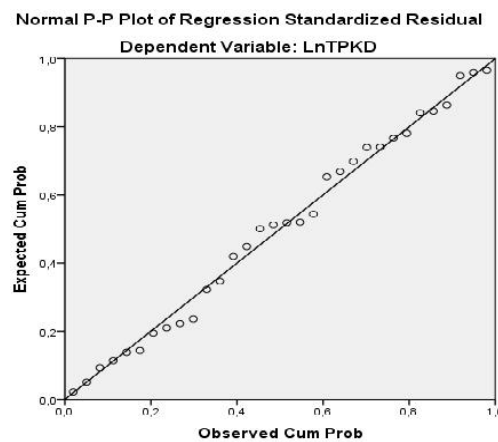
Tabel 3.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IeB	32	4,45	6,80	5,7378	,54490
TKD	32	3,45	50,00	17,2419	13,14526
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Data diolah, 2019

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan apakah model regresi dalam penelitian ini dengan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) atau tidak. Secara umum uji asumsi klasik pada model regresi adalah uji normalitas, heterokedastisitas, multikolonieritas, dan autokorelasi. Menurut Ghozali (2011) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dengan demikian, model regresi penelitian ini hanya menggunakan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan, penelitian ini hanya memiliki satu variabel independen sehingga tidak memenuhi asumsi pengujian multikolonieritas. Demikian pula data yang digunakan hanya satu periode pengamatan sehingga tidak memenuhi asumsi pengujian autokorelasi.

Uji normalitas data dilakukan dengan dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011). Dari hasil uji normalitas dengan analisis grafik histogram dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dengan analisis grafik histogram dalam penelitian disajikan pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Uji Normalitas dengan Grafik Histogram

Sumber: Data diolah, 2019

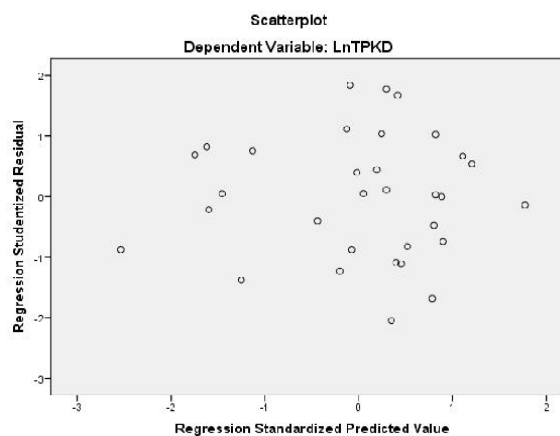
Sementara itu, uji statistik dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), menunjukkan besarnya nilai K-S adalah 0,453 dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,986. Hal ini berarti residual dalam model regresi berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 ($0,986 > 0,05$). Dari pengujian tersebut, dapat dinyatakan bahwa residual dalam model regresi penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dalam penelitian disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,70483558
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		,453
Asymp. Sig. (2-tailed)		,986

Sumber: Data diolah, 2019

Pengujian untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2011). Dari analisis grafik uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot*, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* dalam penelitian disajikan pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot

Sumber: Data diolah, 2019

Begitu pula pengujian dengan analisis statistik menggunakan uji *glejser*, dapat dilihat bahwa variabel independen, yakni implementasi *e-Budgeting* (IeB) tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu absolut unres, dengan nilai *p-value* sebesar 0,991 di atas nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ($0,991 > 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan analisis statistik dengan uji *glejser* dalam penelitian disajikan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,559	,783		,714	,481
1 IeB	,002	,136	,002	,011	,991

Sumber: Data diolah, 2019

Nilai koefisien determinasi dari *model summary* dapat diketahui dari nilai *R square*, yaitu sebesar 0,163 yang mengindikasikan bahwa variabel implementasi *e-Budgeting* (LnIeB) hanya mampu menjelaskan 16,3% terhadap variabel transparansi keuangan daerah. Sedangkan sisanya sebesar 83,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model estimasi yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,403 ^a	,163	,135	,71649

a. Predictors: (Constant), LnIeB

b. Dependent Variable: LnTKD

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil pengujian analisis regresi sederhana menemukan nilai koefisien regresi variabel implementasi *e-Budgeting* (LnIeB) adalah sebesar 3,151. Variabel

implementasi *e-Budgeting* mempunyai *t* hitung sebesar 2,413 dan nilai signifikansi sebesar 0,022. Nilai signifikansi implementasi *e-Budgeting* sebesar 0,022 lebih rendah dari taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 ($0,022 < 0,05$), sehingga dapat diartikan bahwa implementasi *e-Budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Hasil pengujian analisis regresi sederhana dalam penelitian disajikan pada tabel 7 berikut.

Tabel 7.
Analisis Regresi Sederhana

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	-2,919	2,279		-1,281	,210
1 LnIeB	3,151	1,306	,403	2,413	,022

a. Dependent Variable: LnTKD

Sumber: Data diolah, 2019

Pengaruh implementasi *e-Budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah positif dan signifikan, yang berarti bahwa semakin berkualitas implementasi *e-Budgeting* menjadikan tingkat transparansi keuangan daerah yang semakin tinggi pula. Hasil ini menegaskan bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nasution & Atika (2019) yang menemukan implementasi *e-budgeting* menjadikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai lebih informatif (lebih transparan).

Selanjutnya, temuan ini menguatkan argumen Arman *et al.* (2011) yang menyatakan keterlibatan yang lebih besar dari direksi eksternal (di luar manajemen), dapat memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif, sehingga

mengarah pada pengungkapan yang lebih baik (Beekes & Brown, 2006). Dengan demikian, implementasi *e-budgeting* yang berkualitas mampu menjadi penghambat aktivitas penyembunyian informasi, sehingga mengarah pada penyajian informasi yang seluas-luasnya demi peningkatan kesejahteraan bagi semua pihak.

Temuan penelitian ini juga mempertegas argumentasi Mardiasmo (2009) yang menjelaskan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*) menjadi kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah. Akhirnya, untuk meningkatkan kadar transparansi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang, sebagai salah satu solusinya adalah dengan memperbaiki implementasi *e-budgeting* pada saat ini (masa sekarang).

Peningkatan kualitas implementasi *e-budgeting*, disebut pula dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik secara elektronik. Menurut *Indeks Good Governance* (IGI) 2018 peningkatan kualitas implementasi *e-budgeting* berawal dari bagaimana masyarakat (arena masyarakat sipil), pembuat kebijakan politik (arena pemerintah), pelaksana kebijakan (arena birokrasi), dan pelaku ekonomi (arena masyarakat ekonomi) bersinergi dalam membangun kehidupan yang baik (bebas, adil, aman, dan sejahtera). Lebih lanjut, tata kelola yang baik secara elektronik dicapai bila keempat arena di atas berinteraksi dalam suatu keseimbangan sehingga menciptakan suatu sinergi pembangunan yang memberikan hasil bagi kepentingan bersama. Mengingat, keempat arena tersebut

memiliki fungsi dan kinerja yang secara simultan menentukan kualitas implementasi *e-budgeting* di setiap pemerintah daerah, maka selaku pejabat publik berkewajiban untuk senantiasa menjaga simpul interaksi tersebut melalui regulasi maupun kebijakan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada 32 pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jeda waktu selama tiga tahun, yaitu data implementasi *e-budgeting* tahun 2016-2018 dihubungkan (diregresikan) dengan data transparansi keuangan daerah tahun 2018. Hasil regresi menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Atika (2019) yang menemukan bahwa implementasi *e-budgeting* menjadikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai lebih informatif (lebih transparan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang sama yang ditemukan dalam pemerintah daerah Kota Binjai juga ditemukan dalam lingkup yang lebih luas yaitu pemerintahan daerah di Indonesia.

REFERENSI

- Adiwirya, M. F., & Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2), 611–628.
- Arman, H., Beekes, W., & Brown, P. (2011). Corporate governance and transparency in Japan. *Working Paper (Universities of Kwansai Gakuin, Lancaster, New South Wales and Western Australia)*.

- Beekes, W., & Brown, P. (2006). Do better-governed australian firms make more informative disclosures? *Journal of Business Finance & Accounting*, 33(3 & 4), 422–50.
- Beekes, W., Brown, P., Chin, G., & Zhang, Q. (2016). Corporate governance, companies' disclosure practices and market transparency: a cross country study. *Journal of Business Finance & Accounting*, 43(3 & 4), 263–297.
- Cui. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 15(1), 34–47.
- Fajri, R. N., Djumali, & Hartono, S. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang). *Jurnal Balance*, XVI(1), 64–83.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Hermana, B., Tarigan, A., Medyawati, H., & Silfianti, W. (2012). E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web, 3rd. *International Conference on E-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR*, 194–199.
- Lulaj, E., & Haxhi, P. (2019). Transparency And Accountability In The Public Budget, Empirical Study (Data Analysis) In Local Governments-Municipalities. *International Journal of Education and Research*, 7(4), 69–86.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. In *Penerbit Andi*. Yogyakarta.
- Martani, D., Fitriasari, D., & Annisa. (2014). Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 60, 504–518.
- Nasution, A. P., & Atika. (2019). Implementasi E-Budgeting sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1–13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.

- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 30-43.
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Remunerasi dan Semangat Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 71-80.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh SDM, Insentif dan Sarana Pendukung terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 207-218.
- Nasution, D. A. D. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akrual dengan Komitmen SKPD sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara* (Tesis). Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nst, D. A. D. (2019). Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual Pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *LOYALITAS, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41-50.
- Puron-Cid, G., & Gil-Garcia, J. R. (2018). Performance and Accountability in E-Budgeting Projects. *International Journal of Electronic Government Research*, (March 2018), 722–734. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-857-4.ch065>
- Rahman, R. A. T., Irianto, G., & Rosidi. (2018). Evaluation of E-Budgeting Implementation in Provincial Government of DKI Jakarta Using CIPP Model Approach. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001110>
- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. (2013). Indeks keterbukaan badan publik menyediakan informasi anggaran secara berkala: mengukur keterbukaan informasi anggaran berbasis website. Retrieved from sekretariat@seknasfitra.org website: www.seknasfitra.org
- Shopia, A., & Husen, B. (2013). Analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengungkapan informasi pada website (studi pada kota/kabupaten seluruh Indonesia). *Jurnal Media Indonesia*, 12(4).

- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK*, 7(1), 89–101.
- Susanto, A. A., & Halim, A. (2018). Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik*, 1(1), 88–96.
- Trisnawati, N. N., & Wiratmaja, D. N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 768–792.
- Woro, S. J., & Supriyanto, S. (2016). Enhancing Trust, Transparency and Accountability in The Local Development Process. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v20i1.1865>
- Yildiz, F., Sagdic, E. N., & Tuncer, G. (2017). Budgetary Transparency, E Government and Corruption: New Evidence From Panel Data Approach. *Ecoforum Journal*, 6(1), 1–14.
- Zucolotto, R., & Teixeira, M. A. C. (2014). Budgetary Transparency and Democracy: The Effectiveness of Control Institutions. *International Business Research*, 7(6), 83–96. <https://doi.org/10.5539/ibr.v7n6p83>